

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Budiyono, Kabul. *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*. (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2002)
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015)
- Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016)
- Janedjri. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Revitch, Diane. *Demokrasi Klasik & Modern*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. (Malang: Setara Press, 2014)

Sarjiyati, dkk. *ASN ??? Netralitas ASN dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021)

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005)

Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1997)

Suhud, R. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1998)

Jurnal

Arsil, Fitra. "Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, halaman 563

Casmi, Ria. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, Septemeber 2014, halaman 527

Chakim, M. Luthfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Lembaga Etik". *Jurnal Konstitusi*, Nomor 2, Volume 11, 2011, halaman 406

Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum*, Volume 28.2, 2020, halaman 1098

Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokrati". *Jurnal Hukum UII*, Yogyakarta, 2008, halaman 399-400

Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu". *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2019. halaman 69

Puspitasari, Dyan. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Lentera Hukum* Volume 5 Issue 3, 2018. halaman 384, 407

Risnain, Muh. "Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas". *Jurnal Hukum Pemilu*, Volume 6, Nomor 3, 2019, halaman 33

Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti. “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi”. *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 Nomor 1, 2017, halaman 12

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu